

SURAT PERJANJIAN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DENGAN PT ACHILLES ADVANCED SYSTEMS TENTANG

LAYANAN KONEKSI METRO ETHERNET UNTUK DC DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Nomor: 066/AAS/FIN/II/2020

Nomor: K.TEL.203/HK.810/DGS-B2040000/2020

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (02-01-2020), bertempat di Jakarta, antara pihak-pihak :

1. **Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk**, suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Notaris Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, dalam hal ini diwakili oleh **AGUNG DERMAWAN**, Jabatan Account Manager Government Agency Services, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **PT Achilles Advanced Systems**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 12 Agustus 2014 dibuat dihadapan Notaris Alexander Ariyanto, S.H., M.Kn. serta perubahan terakhir dengan Akta Nomor 76 tanggal 19 Januari 2019 dibuat dihadapan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., berkedudukan di Generali Tower – Gran Rubina Business Park, Lt. 10 Unit B-C-D Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, dalam hal ini diwakili oleh **Francois-Guillaume Hermann Lutton**, dalam kedudukannya selaku Kuasa sebagaimana dibuktikan dengan Akta Kuasa No.136 tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT ACHILLES ADVANCED SYSTEMS, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**";

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak dan masing-masing disebut juga sebagai Pihak.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan:

1. Surat Permintaan Penawaran Harga dari **PIHAK KEDUA** tanggal 26 Desember 2019;
2. Surat Penawaran Harga dari **PIHAK PERTAMA** Nomor: Tel.2959/YN 000/DGS-10700000/2019 tanggal 27 Desember 2019;
3. Purchase Order Nomor: PO-0315 tanggal 27 Desember 2019.

maka Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu kepada yang lainnya yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tentang **Layanan Koneksi Metro Ethernet untuk DC Direktorat Jenderal Pajak** (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 PENGERTIAN

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada pasal-pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mendefinisikan pengertian-pengertian sebagai berikut:

- a. Biaya Layanan adalah sejumlah biaya yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** atas pemakaian Layanan berdasarkan Kontrak ini.
- b. Layanan adalah layanan yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk **PIHAK KEDUA** berdasarkan Kontrak ini sesuai dengan Lampiran I.
- c. Pencabutan adalah pemutusan berlangganan Layanan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA menyediakan Layanan untuk **PIHAK KEDUA** sebagaimana **PIHAK KEDUA** menggunakan Layanan tersebut sesuai ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini sesuai dengan kapasitas, lokasi, dan harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

Jangka Waktu Layanan untuk Perjanjian selama 12 (Dua Belas) Bulan terhitung sejak tanggal **1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020** dengan masa berlaku Perjanjian terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban Para Pihak yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Disamping hak-hak yang diatur dalam pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi hak **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Melakukan pemeriksaan penggunaan Layanan berdasarkan Perjanjian ini;
 - b. Menerima pembayaran biaya-biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 Perjanjian ini dari **PIHAK KEDUA** atas pemanfaatan Layanan berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Disamping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Menjaga agar Layanan berdasarkan Perjanjian ini berfungsi baik sesuai kuantitas dan spesifikasi dalam Perjanjian ini;
 - b. Memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** setiap ada kegiatan pemeliharaan (*maintenance*) atau bilamana **PIHAK PERTAMA** akan melakukan tindakan lain yang dapat mengakibatkan tidak berfungsinya atau terganggunya Layanan berdasarkan Perjanjian ini sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Disamping hak-hak yang diatur dalam pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi hak **PIHAK KEDUA**:
 - a. Mendapatkan dan memanfaatkan Layanan berdasarkan Perjanjian ini selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu;
- (2) Disamping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. Melaporkan Gangguan yang terjadi pada Layanan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Melakukan pembayaran biaya atas penyediaan Layanan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
BIAYA-BIAYA

- (1) Biaya yang harus dibayarkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** untuk Layanan berdasarkan Perjanjian ini adalah sebesar **Rp99.000.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah)**, sudah termasuk PPN 10%.
- (2) Perincian atas biaya-biaya dimaksud Ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.



Pasal 7
CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya Layanan dibayarkan secara **BULANAN** sebesar Rp8.250.000,00 (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya, sudah termasuk PPN 10%.
- (2) Pembayaran dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan cara transfer ke rekening **PIHAK PERTAMA** di :
Bank : **MANDIRI;**
Cabang : **Jakarta Sabang;**
Nomor Rekening : **103.000.691.7989;**
Atas Nama : **Telekomunikasi Indonesia;**
dengan biaya transfer ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8
P A J A K

Pajak-pajak yang timbul atas Perjanjian menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
JAMINAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa segala keterangan yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah benar.
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin tidak akan menggandakan dan tidak akan mengadakan perubahan apapun terhadap Layanan berdasarkan Perjanjian ini tanpa ijin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Layanan yang digunakan berdasarkan Perjanjian ini tidak akan disewakan, dijual atau dipindahtangankan dengan cara apapun baik sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10
DENDA / SANKSI

- (1) Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan Layanan sesuai dengan Jangka Waktu yang diperjanjikan, maka **PIHAK PERTAMA** dapat dikenakan denda sebesar 1/1000 dari sisa Biaya Layanan yang belum selesai dikerjakan untuk setiap hari keterlambatan.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak membayarkan biaya Layanan dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah tagihan pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** diterima oleh **PIHAK KEDUA** serta dinyatakan lengkap dan benar, maka **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemutusan dan isolir terhadap Layanan sampai dengan adanya pembayaran diterima dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 11
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau Para Pihak yang mengakibatkan Pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, meliputi namun tidak terbatas pada :
 - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, sabotase, kerusakan jaringan akibat perbuatan pihak ketiga, putus aliran listrik umum/PLN di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya, kebijakan pemerintah dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud Ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (Empat Belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu Pihak karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.

Pasal 12
PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh Para Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban Para Pihak.
- (2) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata terhadap Perjanjian ini.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, sejauh mungkin Para Pihak akan menyelesaikan melalui musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- (3) Keputusan BANI sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini bersifat final dan mengikat.

Pasal 14 KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat bahwa seluruh isi Perjanjian ini harus diperlakukan secara rahasia. Oleh karena itu Para Pihak sepakat untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan atau informasi yang diterima oleh salah satu Pihak dari Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Para Pihak.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan Ayat (1) Pasal ini, adalah dalam hal informasi rahasia tersebut telah menjadi milik umum (*Public Domain*) atau diperoleh secara sah menurut hukum atau perintah/putusan pengadilan atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak, Perjanjian ini diperbolehkan untuk dipublikasikan.

Pasal 15 ITIKAD BAIK

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan secara jujur. Tidak satupun ketentuan dan/atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidakjelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan oleh salah satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak.

Pasal 16 PEMBERITAHUAN

- (1) Segala surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian ini harus disampaikan kepada masing-masing Pihak melalui alamat tersebut di bawah ini :

a. PIHAK PERTAMA

N a m a : Agung Dermawan
Jabatan : Account Manager Government Agency Services
Alamat : Jl. Kebon Sirih No.12 Jakarta 10110
Telepon : 021 – 80675600
Facsimile : 021 – 3845933

b. PIHAK KEDUA

N a m a : PT. Achilles Advanced Systems
U.p. : Finance Team – Head of Finance
Alamat : Generali Tower, Gran Rubina Business Park
Level 10, Unit B-D, Kawasan Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940
Telepon : 021-2205-7787
Facsimile : -

- (2) Perubahan wakil dan alamat Para Pihak sebagaimana tercantum pada Ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

Pasal 17 PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Apabila terjadi penambahan ataupun pengurangan lokasi layanan, dan spesifikasi teknis Layanan, maka perubahan tersebut dituangkan secara tertulis dalam suatu Adendum yang ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** berkeinginan untuk memindahkan titik asal atau akhir sambungan karena perpindahan lokasi, maka **PIHAK PERTAMA** akan membantu memindahkan Layanan berdasarkan Perjanjian ini ke lokasi yang baru sepanjang tersedianya jaringan di lokasi yang baru dengan dikenakan Biaya Instalasi baru.

Pasal 18 KETERPISAHAN

Apabila selama berlakunya Perjanjian ini terdapat pasal yang menjadi tidak sah karena hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya dimengerti dan disetujui oleh Para Pihak bahwa pasal yang tidak sah tidak dapat dilaksanakan, dan/atau pasal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut tidak mengakibatkan berakhirnya Perjanjian ini, sehingga pasal-pasal yang lain masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

Pasal 19 LAIN - LAIN

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam Adendum yang dibuat dan ditandatangani Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini tidak dapat diubah dan/atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan/atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 20
P E N U T U P

- (1) Kesepakatan dan/atau dokumen yang telah dibuat dan ditandatangani sebelumnya oleh Para Pihak dalam rangka penyediaan dan penggunaan Layanan berdasarkan Perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal Perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian ini Para Pihak sepakat bahwa Hukum yang digunakan adalah Hukum yang berlaku di Indonesia.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA
Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk



AGUNG DERMAWAN
Account Manager
Government Agency Services

PIHAK KEDUA
PT Achilles Advanced Systems



FRANCOIS-GUILLAUME
HERMANN LUTTON
Head of Finance and Legal

Lampiran
Daftar Kuantitas dan Harga

NO	Layanan	Periode (Bulan)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Metro-E 2 Mbps (DJP to IDC Jakarta) for the period January 2020 to December 2020	12	7.500.000	90.000.000
			TOTAL	90.000.000
			PPN 10%	9.000.000
			JUMLAH	99.000.000

PIHAK PERTAMA
Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

PIHAK KEDUA
PT Achilles Advanced Systems



AGUNG DERMAWAN
Account Manager
Government Agency Services



FRANCOIS-GUILLAUME
HERMANN LUTTON
Head of Finance and Legal